

**PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN  
PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN BAHAN RUMAH (BBR)  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Oleh :

**Hermanu Iriawan<sup>1</sup>, Herayani Samosir<sup>2</sup>, Dominggus Rudolf Leiwakabessy<sup>3</sup>**  
**hermanu.iriawan@gmail.com**  
**Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS BIAK<sup>1,2,3</sup>**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai Peranan Kepemimpinan dalam meningkatkan pengawasan Bantuan Bahan Rumah (BBR) pada dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor dilihat dari aspek peranannya sebagai perencana, Pembuat Kebijakan, Sebagai Ahli, dan Sebagai Pengendali serta pengawasan dalam penyaluran bantuan bahan rumah (BBR) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Dan mengkaji faktor yang menghambatnya yakni, Komunikasi, Anggaran dan Sumber daya Manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan dinas sosial Kabupaten Biak Numfor dalam pengawasan penyaluran bantuan bahan rumah (BBR) belum berjalan maksimal.*

*Kata Kunci : Peranan, Kepemimpinan, Pengawasan.*

**A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. Sesuai dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. (Wahyudi & Rejekingsih, 2013) menjelaskan dan menunjukkan variabel pendidikan, kesehatan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Kemiskinan itu bersifat multidimensional yang memiliki arti karena manusia memiliki banyak kebutuhan dan bermacam-macam sehingga

kemiskinan mempunyai berbagai macam aspek yaitu aspek primer yang terdiri dari asset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan (Arsyad, 2014). Sedangkan aspek sekunder meliputi jaringan sosial, keuangan dan informasi.

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Bantuan Bahan Rumah yang dibantu dengan melalui secara fisik seperti bahan bangunan yang sifatnya nampak dari dinas sosial, dan Bantuan bahan rumah merupakan salah satu media yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten Biak Numfor untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memfasilitasi bantuan yang dapat meringankan dalam memperbaiki tempat huni yang layak untuk masyarakat miskin. Menurut (Kuncoro, 2006) Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

Di Kabupaten Biak Numfor keluarga penerima manfaat (KPM) secara keseluruhan dari kampung yang ada 261 wilayah berdasarkan distrik berjumlah 17.529 Kepala Keluarga, hal tersebut sudah masuk pada kategori sebagai penerima bantuan bahan rumah. Namun hal ini penulis menemukan bahwa peran dinas sosial dalam penanganan tersebut belum maksimal hal ini terlihat proses pelaksanaan yang dilakukan belum terlihat memadai dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor dan Kemensos ditemukan berdasarkan data keluarga Kemiskinan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan 19 Distrik yang ada dengan jumlah penduduk sebesar 148.404 penduduk, terlihat rumah tangga miskin per kartu keluarga Tahun 2019 adalah 17.529 secara keseluruhan dari distrik yang ada. Artinya bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Biak Masih tinggi sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani Penanggulangan kemiskinan belum maksimal. (Tonapa et al., 2015) menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Jayapura tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan (melek huruf) berpengaruh signifikan dan berpengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jayapura. Karena masih kurangnya peningkatan kapasitas lahan pertanian, penyediaan pupuk dan bibit ikan serta teknologi yang kurang memadai.

Menurut Gubernur Papua, bila sesuai rencana, Papua pada tahun 2020 bakal mendapat bantuan perbaikan 3.500 unit

rumah. Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki rumah seluruh orang Papua yang belum layak huni. "Saya sudah minta instansi terkait untuk segera action, dan tahun depan kita targetkan perbaikan rumah warga menjadi 5.000 unit," kata terang dia. Sementara itu, acara penyerahan bantuan dilangsungkan pada Halaman Kantor Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Supiori Jules Warikar, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltip, serta Anggota DPR RI Wellem Wandik dan sejumlah unsur Muspida Kabupaten Biak. (Info@papua.go.id).

Jika dilihat dari penerima bantuan bahan rumah (BBR) pada tahun 2013 per distrik, jumlah penerima sekitar 100 kepala rumah tangga dari berbagai distrik yang ada, pada tahun 2014 jumlah penerima bantuan bahan rumah semakin meningkat menjadi 108 kepala rumah tangga, tahun 2017 penerima Bantuan Bahan Rumah Menurun menjadi 75 kepala keluarga, namun pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 150 orang. hal ini mengindikasikan bahwa peran dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan belum maksimal. (Bennis & Burt Nanus, 2006, p. 2). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan terdapat pemimpin dan pengikut. Memang benar bahwa seorang pimpinan baik secara individual maupun sebagai kelompok, tidak mungkin dapat bekerja sendirian akan tetapi membutuhkan sekelompok orang lain yang dikenal sebagai bawahan, yang digerakkan sedemikian rupa sehingga para bawahan itu

memberikan pengabdian dan sumbangsinya kepada organisasi, terutama dalam cara bekerja efektif, efisien, ekonomis dan produktif.

Hal tersebut diatas secara keseluruhan berdasarkan data maka program yang dikucurkan oleh pemerintah Papua terutama di kabupaten biak numfor belum berjalan baik, hal ini masih dalam tahap perencanaan dan bantuan yang diberikan masih dalam bentuk uang sehingga proses bantuan yang disalurkan tidak efektif karena masyarakat cenderung untuk lebih memakai ke hal-hal yang lain. Kemudian hal tersebut diperlukan pengawasan dan strategi yang efektif harus dilakukan oleh dinas sosial dalam melakukan penyaluran bantuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.(Kartono, 2002, p. 153) pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tersebut. (Siagian, 2003, p. 112)mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh sebab itu bahwa persoalan yang terjadi dalam pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial belum maksimal karena koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan tidak tegas, sehingga proses pelaksanaan yang dilakukan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian tidak adanya kroscek yang dilakukan oleh pimpinan di

lapangan sehingga terjadi miskomunikasi yang tidak bagus kepada bawahan dan masyarakat. Hal ini juga terlihat kurangnya data yang valid untuk dilakukan pemulihan yang menerima bantuan bahan rumah sehingga proses penyaluran terkadang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu pentingnya pengawasan dilakukan secara keseluruhan agar dpat terjadi proses pelaksanaan yang tepat dan efektif(Lalu et al., 2013)Hasil penelitian menunjukkan dari pengawasan yang dilakukan LSM FITRA yang ditemukan peneliti adalah untuk tahun 2012 peneliti tidak menemukan adanya hasil yang sesuai target dari pengawasan yang mereka lakukan karena LSM tidak terlalu membahas lebih jauh tentang investigasi yang mereka lakukan di lapangan. Artinya tindakan mereka untuk pengawasan APBD bantuan sosial tahun 2012 hanya sampai pada tahap tersebut.

Kepemimpinan yang ada di dinas sosial Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan optimal sehingga masih perlu dilakukan perbaikan seperti komunikasi, koordinasi, serta kerjasama yang kolektif dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan seperti Bantuan Bahan Rumah yang penulis kaji sebagai permasalahan dalam penelitian ini, Kemudian masih perlu adanya pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mampu memberikan pengarahan kepada bawahannya agar program dapat dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat karena masih ada program-program sosial yang belum terlaksana sesuai target yang ditentukan, kemudian dalam hal ini BBR dilihat dari pengawasannya belum efektif karena pelaksanaan dan hasil yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan target yang ditentukan sehingga tingkat kepuasan dalam pembangunan yang dilakukan oleh

masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak berjalan dengan efektif.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Peranan Kepemimpinan

Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh (Soerjono, 2006, p. 238) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Menurut (Biddle & Thomas, 1966) peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, Perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Mengadopsi pendapat kedua para ahli tersebut, bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduki suatu posisi tertentu diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya kearah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan terutama seorang pemimpin, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan *role expectation*. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang

menerima manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut.

Menurut (Harbani, 2010, p. 33) Pemimpin mempunyai peranan yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun peran kepemimpinan adalah sebagai berikut yaitu: a) Peran Pengambilan Keputusan. Yaitu kewenangan pemimpin untuk mengambil keputusan dalam menentukan arah dan melakukan perbaikan manajemen pada sebuah organisasi. b) Peran Mempengaruhi. Peran pemimpin birokrasi harus mampu memberikan pengaruh dalam kelangsungan organisasi. c) Peran Motivasi. Peran motivasi merupakan sebuah peranan yang bertujuan sebagai pemotivasi struktural dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja anggota. Dengan kata lain pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada anggota dalam melaksanakan tujuan organisasi. d) Peran Antar Pribadi. Peran antar pribadi yang dimaksud adalah peran pemimpin dengan anggota secara pribadi, hal ini untuk meningkatkan rasa kebersamaan antara pemimpin dengan anggota. e) Peran Informasional Peran informasional merupakan peranan yang dilakukan oleh pemimpin untuk melakukan serta memberikan informasi kepada anggota serta menanyakan informasi kepada anggota dalam merumuskan sebuah tujuan organisasi.

### 2. Konsep Pengawasan

Menurut (Effendi, 2014, p. 138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut (Fahmi, 2014, p. 138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarnodalam(Safrudin, 2002, p. 36)adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah, 1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat. 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

### **3. Konsep Bantuan Bahan Rumah (BBR)**

Bantuan sosial di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bab I Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bab I Huruf B angka 9 disebutkakan bahwa Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Selanjutnya pada angka 10 dijelaskan bahwa Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Pasal 1 angka 1: Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Dalam kerangka relokasi, Pasal 7 ayat (1) Bantuan langsung dalam bentuk papan adalah untuk: a. relokasi hunian; dan/atau b. hunian sementara. Ayat (2) Relokasi hunian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank.

Implementasi bantuan tersebut, dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 123/LJS/VI/2011 tentang Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, pada ketentuan keempat: besarnya bantuan stimulan BBR untuk korban bencana alam maksimal sebesar Rp.25.000.000,- per unit rumah/KK yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan BBR, status dana yang diberikan dalam rangka relokasi/pembangunan rumah korban bencana alam adalah bantuan (hibah).

Penentuan persyaratan bantuan sosial di atas merupakan salah satu strategi untuk optimalisasi pemanfaatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sistem penyaluran dana menggunakan mekanisme perbankan. Dalam pengertian ini adalah stimulan dalam bentuk dana sebesar Rp15.000.000,- disalurkan secara langsung (cash transfer) kepada masyarakat melalui rekening kelompok. Sedangkan untuk pencairan dana di bank harus dilakukan oleh dua orang yakni ketua dan bendahara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidak terbukaan pengelolaan keuangan milik kelompok. Masyarakat mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan dana stimulan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, mempunyai keuntungan yakni proses lebih cepat sampai pada penerima bantuan dibanding dengan bantuan barang yang harus melalui lelang, tender dan pengirimannya. Penyaluran bantuan dengan mekanisme perbankan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

pengelolaan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Meskipun masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri, namun dalam penggunaan dana stimulan dana tersebut tidak untuk dipergunakan sebagai upah tukang dan isi rumah (kebutuhan rumah tangga seperti meja dan kursi, perabot rumah tangga, Radio/Televisi, tempat tidur dan lain lain).

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis BSBBR disebutkan bahwa Sasaran program adalah: 1. Keluarga/Masyarakat korban bencana alam yang rumahnya mengalami kerusakan dan masih dalam keadaan belum diperbaiki serta mau menerima bantuan BBR, terutama bagi korban bencana yang kondisi sosial ekonominya tergolong tidak mampu. 2. Keluarga/Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana alam dan mau direlokasi/dipindahkan/dimukimkan ke daerah yang lebih aman dari ancaman bencana alam. 3. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi penerima bantuan (BBR) menyediakan dana sharing dan atau lahan relokasi (Kemensos, 2011).

Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa Bahan Bantuan Rumah merupakan program khusus dari pemerintah dinas sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni untuk diberikan berupa bantuan baik itu berupa uang atau alat yang menunjang kebutuhan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan data yang telah dilakukan sebelumnya.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dipadukan dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan

dengan Wawancara dengan informan yang dapat memberikan informasi secara akurat dan Observasi serta kepustakaan dan Dokumentasi, Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan kerja masing-masing. Dalam kenyataannya, setiap pimpinan organisasi/unit kerja akan selalu ingin berusaha mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya. Berusaha mengetahui apakah semua kegiatan sudah berlangsung sesuai perencanaan, peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk itu setiap pemimpin harus melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya.

Sehingga peranan kepemimpinan sangat penting dan dominan dalam melakukan setiap pengawasan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai untuk mencapai target yang diharapkan berdasarkan visi dan misi yang telah direncanakan dalam hal ini penyaluran bantuan bahan rumah (BBR), untuk itu perlu upaya yang efektif dalam mengontrol hal tersebut agar dapat menjadi program yang bermanfaat dan berguna kepada masyarakat. Olehnya itu, untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan pengawasan Bantuan Bahan Rumah (BBR) di Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

berdasarkan Hasil wawancara kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dalam melakukan peranan kepemimpinan dalam fungsi pengawasan dalam meningkatkan pengawasan penyaluran Bantuan Bahan Rumah dengan melakukan pengamatan secara langsung dan berkala untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan baik. Disamping itu kehadiran pimpinan sangat penting dan menunjang kedisiplinan pegawai dalam melakukan pekerjaannya.

Untuk itu berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mencoba mengkaji secara mendalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor berdasarkan pokok permasalahan Peranan Kepemimpinan dalam meningkatkan pengawasan Penyaluran bantuan bahan Rumah dengan menganalisa 5 (Lima) item peranan kepemimpinan yaitu, sebagai Perencana, Sebagai Pembuat Kebijakan, Sebagai Pelaksana, Sebagai Ahli dan sebagai Pengendali, yang mengacu pada pendapat Anoraga et al. (1995) dalam (Tika H, 2006, p. 64)

##### **1. Sebagai Perencana**

Kepala dinas mempunyai peranan yang dominan dalam melakukan perencanaan dengan baik, agar organisasi yang dipimpinnya dapat berkembang dengan baik, sehingga sebagai perencana mampu mengatasi permasalahan yang akan terjadi ke depan kemudian mampu memproyeksi hal yang urgen untuk mencapai sasaran dari program yang dilaksanakan seperti program Bantuan Bahan Rumah (BBR).

Permasalahan dalam Peranan Kepemimpinan sebagai perencana dalam meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan bahan rumah yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Pekerja Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan sebagai perencana dalam meningkatkan pengawasan penyaluran Bantuan Bahan Rumah di Kabupaten Biak Numfor sudah berjalan dengan optimal dan baik, hal ini terlihat dari penjelasan yang dikatakan oleh bawahannya bahwa pimpinan dapat berpikir secara idealis atau mampu melakukan terobosan baru dalam melaksanakan setiap program yang akan dilakukan, hal ini juga terlihat dari penjabaran dari pelaksanaan program Bantuan Bahan Rumah ini bisa tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang di inginkan.

Olehnya itu, Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun diluar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar.

## 2. Sebagai Pembuat Kebijakan

Salah satu tugas terpenting seorang pemimpin adalah untuk menentukan yang terbaik bagi organisasi dan para anggotanya. Namun dalam mengambil keputusan, terkadang pemimpin pun menghadapi dilema dan seolah berada di persimpangan jalan. Apalagi jika pilihan yang ada membuat Anda harus mengorbankan kepentingan orang lain atau

memberikan resiko yang akan merugikan tim. Namun kadangkala keputusan sulit harus diambil demi terwujudnya cita-cita bersama. Adakalanya pemimpin ternyata mengambil keputusan yang salah dan merugikan organisasi. Tetapi percayalah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan masih lebih baik dibandingkan tidak melakukan tindakan apapun sama sekali.

Oleh karena itu seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan untuk menjalankan roda organisasi yang di pimpinnya agar sumber daya yang dimiliki dapat melakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam membuat kebijakan terhadap program penyaluran bantuan bahan rumah (BBR) belum baik, hal ini terlihat bahwa proses pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik dilapangan karena kebijakan yang buat oleh pimpinan dilakukan dengan kebijakan yang disepakati sebelumnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan koordinasi dan komunikasi kepada bawahan tidak berjalan dengan baik. Hasil pengamatan penulis dilapangan melihat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan program BBR ini belum sesuai dengan pelaksanaannya, kemudian kebijakan yang dibuat belum terukur dengan jelas sehingga menyebabkan tumpang tindih sehingga bawahan yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya melaksanakannya dengan baik.

Oleh karena itu Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dalam membuat kebijakan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Jika pemimpin lamban dan



ragu-ragu dalam bertindak, anak buah akan melihat Anda sebagai orang yang indecisive, takut, dan tidak tegas sehingga membuat mereka mempertanyakan kemampuan Anda bahkan kehilangan kepercayaan terhadap Anda.

### 3. Sebagai Pelaksana

Pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerjasama dalam merealisasikan suatu program kerja. Pemimpin dapat mengembangkan berbagai teknik mempengaruhi bawahan, dan ini sebenarnya mudah bagi pemimpin dalam organisasi karena kewenangan atasan sangat tinggi. Tetapi kalau hanya mengandalkan kewenangan semata-mata, juga tidak akan memberikan efek yang berarti terhadap bawahan. Pemimpin organisasi dapat memodifikasi kewenangan dan keunggulan-keunggulan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin birokrasi. Olehnya itu peran pemimpin sebagai pelaksana sangat penting dalam meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan bahan rumah agar dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Pelaksana disini dilihat dinas Sosial harus mampu mengakomodir segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya untuk agar pelaksanaan program bantuan bahan rumah (BBR) dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep yang akan dilakukan ke depan. Kepala dinas sosial harus mampu memutuskan permasalahan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan yaitu pengentasan kemiskinan berdasarkan visi dan misi yang ada di Dinas Sosial kabupaten biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan sebagai pelaksana dalam pengawasan bantuan bahan rumah (BBR) belum optimal, hal ini terlihat dari pengawasan

yang dilakukan hanya sebatas pada wacana namun tidak terjun langsung kelapangan melakukan pengecekan apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian hal tersebut juga terlihat bahwa proses pelaksanaan program bantuan bahan rumah (BBR) tersebut belum efektif karena sumber daya manusia yang di berikan amanah terkadang tidak menjalankan dengan baik sehingga proses penyaluran bantuan tersebut terhambat dan pembangunan rumah oleh masyarakat yang membutuhkan terkendala. Disamping itu, peranan kepala dinas sebagai pelaksana program BBR tersebut hanya dilakukan dengan arahan saja kepada bawahan namun proses pengawasan yang dilakukan secara jelas dilapangan kepada bawahan tidak dilakukan meskipun kroscek administrasi sesuai dengan target yang telah diberikan.

### 4. Sebagai Ahli

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai keahlian dari segala bidang untuk dapat meningkatkan sektor organisasi, seperti keahlian dalam menjalankan program-program dengan mampu menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan program tersebut. Olehnya itu pemimpin yang mempunyai peranan sebagai ahli harus mampu menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang dimilikinya sehingga bawahan mampu menyerap dari apa yang dilakukan oleh pimpinan.

Kepala dinas sosial kabupaten biak numfor jika dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat mumpuni berdasarkan dengan bidang keahlian yang dimilikinya, hal tersebut terlihat karena kepala dinas sosial mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan bahan rumah meskipun belum efektif, disamping itu aparaturnya dinas sosial berdasarkan bidang yang ada sudah baik, namun dalam pelaksanaan program

bantuan bahan rumah masih terhambat pada sumber daya manusia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bahwa peranan kepemimpinan sebagai ahli dapat dianalisis bahwa perannya belum optimal, hal ini terlihat dari pengarahan yang dilakukan kepada bawahan tidak berjalan dengan baik. Kemudian komunikasi yang dibangun kepada bawahan tidak berjalan sehingga proses pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan bahan rumah ini belum berjalan dengan baik. Hasil pengamatan penulis dilapangan ditemukan bahwa peran kepemimpinan kepala dinas sosial terlihat dari segi komunikasi seperti penyampaian arahan kepada bawahan terkadang tidak efektif karena proses penyampaiannya tidak dipahami oleh bawahannya, kemudian dalam penguasaan program bantuan bahan rumah (BBR) ini masih kurang.

(Bennis & Burt Nanus, 2006, p. 3) mengatakan bahwa berperan kepemimpinan dapat dilihat dari aspek peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih. Memaknai pendapat Werren Bennis tersebut, bahwa para pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan pada sebuah organisasi dituntut melaksanakan peran kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana administrasi dalam sebuah organisasi. Untuk mempengaruhi sumberdaya pegawai kearah pencapaian tujuan, tidak semudah apa yang dibayangkan, karena sumber daya pegawai memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin untuk menggerakkannya.

##### 5. Sebagai Pengendali

Dalam menghadapi motivasi pegawai, pemimpin harus tahu bahwa manusia itu bersifat dinamis, yaitu senantiasa berubah keinginan, kemauan, kebutuhan dan tuntutan, maka dari itu seorang pemimpin perlu setiap saat berusaha mengetahui apa yang menjadi keinginan pegawainya, terutama dalam hubungan antar pegawai tersebut dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu jika dilihat dari berbagai karakter pegawai yang ada di dinas sosial sangat bervariasi dari berbagai latar belakang yang ada. Sehingga hal tersebut dibutuhkan peranan kepemimpinan kepala dinas sosial dalam membentuk karakter mereka dengan mengendalikan agar dapat menerima perintah serta melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya. Karena Pengendalian adalah kegiatan memantau, menilai, dan melaporkan kemajuan proyek disertai tindak lanjutnya. Melalui fungsi pengendalian, pemimpin dapat menjalankan organisasi agar tetap berproses pada arah yang benar dan tidak membiarkan deviasi (penyimpangan) yang terlalu jauh dari arah tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu peranan kepemimpinan sebagai pengendali dalam menjalankan organisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai, serta menjadi penilaian tersendiri bagi seorang pimpinan dalam bertindak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan sebagai pengendali belum baik. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan program BBR belum optimal karena pemimpin dalam hal ini kepala dinas belum mengendalikan secara tegas mengukur standar kinerja dan menetapkannya, oleh karena itu faktor tersebut menjadi ukuran bahwa sebagai pengendali dalam pengawasan program

bantuan bahan rumah (BBR) belum optimal, sehingga bawahan yang melaksanakan hal tersebut tidak melaksanakannya dengan baik sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut pendapat Drucker yang dikutip oleh Crainer dalam fungsi pengendalian, yang mengatakan terdapat lima dasar peran pemimpin yang meliputi Menetapkan tujuan, Mengorganisasikan, Memotivasi, Mengkomunikasikan, Mengukur perkembangan kemampuan para staf. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan sebagai pengendali dalam pengawasan penyaluran bantuan bahan rumah di kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik, sehingga hal ini perlu lebih meningkatkan standar kinerja dan ukuran kinerja yang jelas agar proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

1) Faktor yang menjadi Hambatan Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pengawasan Penyaluran Bantuan Bahan Rumah (BBR) Pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

a. Komunikasi

Komunikasi dalam kepemimpinan melibatkan minimal dua pihak: Pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin. Komunikasi antara keduanya sangat menentukan dalam hal ini. Seorang pemimpin sering kali merasa bahwa ia sudah menyampaikan suatu pesan kepada bawahannya secara jelas. Berarti, bawahannya harus menjalankannya. Karena komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan menentukan arah kesuksesan program pemberian bantuan bahan rumah (BBR) di kabupaten

Biak Numfor, karena itu peranan kepemimpinan dalam melakukan pengawasan dalam menjalankan program tersebut komunikasi yang dibangun kepada bawahan harus terukur dan jelas agar bawahan dapat menganalisa secara jelas apa yang disampaikan oleh atasan agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang telah direncanakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bahwa peranan kepala dinas dalam pengawasan penyakuran bantuan bahan rumah (BBR) seperti komunikasi belum efektif. Hal ini terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kepala dinas kepada bawahan hanya sebatas tegur sapa saja, kemudian dilihat dari proses rapat atau ketemu langsung itu tidak terjadi bahkan jarang sehingga proses komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam pelaksanaan program bantuan bahan rumah tersebut tidak berjalan dengan optimal. Kemudian proses komunikasi yang terjadi adalah kepala dinas hanya mendengarkan pemaparan dari bawahannya saja. Hal ini mengindikasikan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam pengawasan untuk meningkatkan kinerja pegawai belum efektif karena kepala dinas yang berperan sebagai pengontrol tidak terjadi. Sehingga hal tersebut bahwa komunikasi yang dibangun oleh atasan kepada bawahannya hanya terjadi ketika ada pemaparan yang urgen saja itupun

keterlibatan seluruh komponen yang ada tidak dilibatkan.

b. Anggaran

Berbicara mengenai anggaran dalam program bantuan bahan rumah (BBR) sangat penting untuk disediakan karena hal tersebut sangat urgen agar program dapat berjalan dengan baik. jika dianalisis secara keseluruhan berdasarkan data maka program yang dikururkan oleh pemerintah Papua terutama di kabupaten biak numfor belum terlihat baik, hal ini masih dalam tahap perencanaan dan bantuan yang diberikan masih dalam bentuk uang sehingga proses bantuan yang disalurkan tidak efektif karena masyarakat cenderung untuk lebih memakai ke hal-hal yang lain. Kemudian hal tersebut diperlukan pengawasan dan strategi yang efektif harus dilakukan oleh dinas sosial dalam melakukan penyaluran bantuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan diatas dapat kita analisa bahwa anggaran memang sangat penting namun dalam pengelolaannya sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena dalam program ini sangat penting untuk dilakukan pengelolaan anggaran agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dan proses pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu pemerintah harus mampu menyediakan anggaran pada program tersebut karena hal itu

penting dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Biak numfor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bahan rumah adalah kurangnya anggaran yang masuk ke dinas sosial untuk lebih efektif mengentaskan kemiskinan melalui bantuan program tersebut. Dalam pengawasan Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja, tetapi di dalam pelaksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang direncanakan.

Olehnya itu penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengawasan penyauran bantuan bahan rumah dalam meningkatkan kinerja dinas sosial perlu kiranya disesuaikan ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, karena program tersebut sangat bagus dalam membenahi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat miskin. Ketersediaan anggaran harus diperjelas agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kendala sehingga masyarakat menjadi puas dalam kinerja dinas sosial kabupaten Biak Numfor.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat penting dalam organisasi, disamping itu seseorang yang melakukan kerjanya sangat ditentukan dengan sumber daya manusia yang dimilikinya sebab salah satu unsur kesuksesan sebuah organisasi dalam menjalankan usahanya maka dilihat dari kualitas sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu peranan kepemimpinan sangat penting dilakukan oleh dinas sosial kabupaten biak numfor dalam memerankan sebagai pemimpin dalam menjalankan program bantuan bahan rumah (BBR) di kabupaten biak numfor dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Disamping itu Kepala dinas harus mampu menetralkan kemampuan pegawai berdasarkan bidang yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman yang dimiliki, dan kuantitas pegawai dalam melakukan program tersebut.

Di dinas sosial kabupaten biak jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki masih belum terlihat secara jelas kemampuan pegawai yang dimiliki dalam meningkatkan kerjanya, hal ini disebabkan karena kemampuan pegawai dalam menjalankan program bantuan bahan rumah tersebut tidak diakomodir secara baik oleh kepala dinas sosial di kabupaten biak numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus

diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Perubahan juga diperlukan sebuah dukungan dari pimpinan puncak sebagai langkah pertama yang penting untuk dilakukan. Organisasi merupakan sarana orang-orang dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dalam wadah kegiatan ini, setiap orang harus memiliki kemampuan dan tanggung jawab masing-masing sesuai jabatannya.

Hal ini lah yang membuat kinerja sebuah organisasi akan terhambat dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang seharusnya telah ditentukan oleh waktu. Tidak sedikit dari pegawai yang masih berpikir bahwa sebagai pegawai pemerintahan tidak perlu bekerja semaksimal mungkin, dikarenakan gaji yang telah ditetapkan hingga tunjangan yang diberikan. Perilaku buruk pegawai yang melaksanakan kegiatan hal-hal lain diluar kewajibannya, membuat dampak buruk bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat selalu mengharapkan penyelenggara pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Hanya saja dalam prakteknya, harapan ini masih tidak terpenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat bahkan daerah. Hingga ini masih banyak ditemukan kasus-kasus pelayanan

yang jauh dari harapan masyarakat.

#### E. KESIMPULAN

Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pengawasan Penyaluran Bantuan Bahan Rumah (BBR) Pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat kepala dinas belum mampu melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam meningkatkan peranan kepemimpinannya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Kemudian dilihat dari peranannya sebagai Perencana Kepala dinas belum baik hal ini terlihat bahwa program Bantuan Bahan Rumah (BBR) tidak dilakukan dengan baik oleh bawahannya, sebagai pembuat kebijakan peranannya cukup baik hal ini kepala dinas mampu memberikan kebijakan yang mampu memberikan solusi kepada masyarakat, sebagai Pelaksana peranan kepala dinas masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan, sebagai ahli kepemimpinan kepala dinas cukup baik hal ini dilihat dari peranannya sebagai pimpinan mempunyai keahlian dan menemukan ide yang baru, dilihat sebagai pengendali peranan kepemimpinannya belum optimal hal ini terlihat kepala dinas belum mampu menyelesaikan permasalahan komunikasi kepada bawahan untuk melakukan pengawasan terkait program bantuan bahan rumah (BBR) tersebut.

Sedangkan Faktor yang menjadi hambatan dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Bahan Rumah (BBR) Pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor di lihat dari; a) Komunikasi, peranan kepemimpinan dalam melakukan komunikasi kepala dinas dalam melakukan pengawasan kepada bawahannya belum optimal. Hal tersebut terjadi karena proses komunikasi tidak

dilakukan dengan baik kepada bawahan. b) Anggaran, dilihat dari pengadaan anggaran untuk Bantuan Bahan rumah (BBR) belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari proses penyaluran masih terkendala. c) Sumber daya manusia, peranan kepemimpinan dalam melakukan pengawasan kepada bawahan ditemukan bahwa sumber daya manusia belum baik, karena terkendala dari batasan usia pelaksana dilapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2014). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Keem). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bennis, W., & Burt Nanus. (2006). *Leaders, Strategi Untuk Mengemban Tanggung Jawab*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Biddle, B. ., & Thomas, E. . (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Effendi, U. (2014). *Asas-Asas Manajemen*. Depok: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harbani, P. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi Umum*. Bandung: Sinar Baru Algies Indonesia.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lalu, R., Widayati, W., & Utomo, S. (2013). Peran LSM Fitra Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Jawa Tengah (Studi Kasus APBD Bantuan Sosial Provinsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3581>

- Safrudin, A. (2002). *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Tika H, M. P. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan Pertama. PT. Bhumi Aksara: Jakarta.
- Tonapa, T., A.N, & dkk. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Jayapura Tahun 2004-2013. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2(3).
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1914/1912>
- Lainnya :**
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling)
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.